



**SAMBUTAN
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DALAM ACARA MUSRENBANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017-2022**

*PERGI KE KEBUN MEMETIK SAHANG
REHAT SEJENAK MEMBELI KURMA
SELAMAT DATANG DI ACARA MUSRENBANG
SUKSESKAN PEMBANGUNAN BERSAMA-SAMA*



DASAR HUKUM

UU No. 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

UU No. 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

PP No. 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah



Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014



Permendagri No. 54 Tahun 2010 Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah



TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD

- 1 Persiapan Penyusunan
- 2 Penyusunan Rancangan Awal
- 3 Penyusunan Rancangan
- 4 **Pelaksanaan Musrenbang**
- 5 Perumusan Rancangan Akhir
- 6 Penetapan



VISI

**Babel Sejahtera,
Provinsi Maju yang Unggul di Bidang
Inovasi Agropolitan dan Bahari
dengan Tata Kelola Pemerintahan dan
Pelayanan Publik
yang Efisien dan Cepat
Berbasis Teknologi**



TEMA MUSRENBANG

**PEMANTAPAN PEMBANGUNAN
MENUJU BANGKA BELITUNG YANG
SEJAHTERA, MAJU, UNGGUL DAN
MANDIRI DALAM PEMANFAATAN
POTENSI DAERAH SECARA OPTIMAL**



6 Misi

1

• **MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS POTENSI DAERAH**

2

• **MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS DAERAH YANG BERKUALITAS**

3

• **MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL DAN HANDAL**

4

• **MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT**

5

• **MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI**

6

• **MENINGKATKAN PENGENDALIAN BENCANA DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**



11 PRIORITAS

1 • PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN

2 • PEMBANGUNAN BAHARI

3 • PEMBANGUNAN PARIWISATA

4 • PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN

5 • PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

6 • PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR

7 • PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

8 • PEMBANGUNAN KESEHATAN

9 • PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI

10 • PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

11 • PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN

9 TUJUAN RPJMD

1 • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

2 • Meningkatkan pendapatan masyarakat

3 • Meningkatkan infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan
• potensi daerah

4 • Meningkatkan pendidikan masyarakat

5 • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

6 • Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas

7 • Meningkatkan Pembangunan Demokrasi

8 • Meningkatkan tata kelola kebencanaan

9 • Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup



25 ISU STRATEGIS (1)

Isu Ekonomi

1. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah
2. Tingkat pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi
3. Nilai tambah dan daya saing produk UKM yang masih rendah
4. Kemandirian Pangan Rendah
5. Tingginya tingkat inflasi
6. Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral belum optimal
7. Hilirisasi sumber daya mineral masih rendah
8. Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan
9. Tingkat Investasi Rendah
10. Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk

Isu Infrastruktur dan Konektivitas

11. Kebutuhan akan energi tidak seimbang dengan pertumbuhan penyediaan sumber energi
12. Konektivitas antar pulau sebagian besar sulit dijangkau
13. Kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah masih tinggi
14. Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik
15. Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas
16. Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika



25 ISU STRATEGIS (2)

Isu Sumber Daya Manusia

17. Tingkat pendidikan SDM masih rendah

Isu Kesehatan

18. Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas

19. Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah

20. Pengguna narkoba dan penderita HIV AIDS meningkat

Isu Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Demokrasi

21. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal

22. Kondusivitas demokrasi belum stabil

Isu Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

23. Lingkungan hidup banyak yang rusak

24. Rawan bencana

25. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten



54 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH(1)

1. Program Penyusunan kebijakan Perlindungan lahan pertanian untuk berkelanjutan
2. Program Peningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan
3. Program Pengembangan KUKM
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Program Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan perternakan khususnya komoditas karet, Lada dan sapi
6. Program Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilyah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
7. Program Peningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya
8. Program Pengembangan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan
9. Program pengembangan pembangunan pariwisata
10. Program Pengembangan kawasan pendukung pembangunan pariwisata
11. Program Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
12. Program Peningkatan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah hasil tambang yang berwawasan lingkungan
13. Program Pengembangan industri pengolahan
14. Program Pengembangan Kawasan industri berbasis potensi daerah
15. Program Pengembangan Kemandirian Energi
16. Program Penciptaan Peluang lapangan pekerjaan dan usaha
17. Program Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS
18. Program peningkatkan pengendalian Inflasi Dearah
19. Program Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk



54 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH(2)

20. Program Pemenuhan infrastruktur pertanian
21. Program Pemenuhan infrastruktur air baku
22. Program Pemenuhan infrastruktur penunjang pariwisata
23. Program Pemenuhan ketersediaan perumahan yang layak bagi masyarakat
24. Program peningkatan ketersediaan air bersih bagi masyarakat
25. Program Peningkatkan ketersediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat
26. Program Peningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat
27. Program pengembangan konektivitas perhubungan laut
28. Program pengembangan konektivitas perhubungan darat
29. Program peningkatan kelancaran akses jalan dalam mendukung pengembangan potensi daerah
30. Program Peningkatkan partisipasi sekolah masyarakat
31. Program Peningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
32. Program Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral
33. Program Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat



54 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH(3)

34. Program Peningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah
35. Program Peningkatan tata kelola pengawasan
36. Program Peningkatkan manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja
37. Program peningkatan manajemen pelaksanaan urusan pemerintah daerah
38. Program peningkatan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan
39. Program Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa
40. Program Peningkatan pencapaian reformasi birokrasi
41. Program peningkatan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah
42. Program Peningkatan pelayanan pemerintah yang efektif dan efisien berbasis teknologi
43. Program Peningkatan kebebasan sipil Masyarakat
44. Program Peningkatan partisipasi politik masyarakat
45. Program pengembangan lembaga demokrasi
46. Program peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
47. Program Pengembangan kawasan berbasis penanggulangan bencana
48. Program Peningkatan tanggap darurat penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
49. Program Peningkatan pelayanan terhadap korban bencana alam dan bencana sosial
50. Program Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam dan bencana sosial
51. Program Peningkatkan kualitas air
52. Program Peningkatan kualitas Udara
53. Program peningkatan pengendalian dan pengawasan hutan
54. Program pengendalian terhadap lingkungan Hidup



51 STRATEGI (1)

1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan
2. Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan
3. Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan peternakan
4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya
6. Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan
7. Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata
8. Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata
9. Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
10. Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan
11. Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah
12. Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik daerah
13. Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan
14. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap
15. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi
16. Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk



51 STRATEGI (2)

17. Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur pertanian
18. Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku
19. Meningkatkan infrastruktur penunjang pariwisata
20. Meningkatkan ketersediaan perumahan yang layak bagi masyarakat
21. Meningkatkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat
22. Meningkatkan ketersediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat
23. Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat
24. Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut
25. Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat
25. Meningkatkan kelancaran akses jalan dalam mendukung pengembangan potensi daerah
27. Meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat
28. Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
29. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat



51 STRATEGI (3)

30. Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah
31. Peningkatan tata kelola pengawasan
32. Meningkatkan manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja
33. Meningkatkan manajemen pelaksanaan urusan pemerintah daerah
34. Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan
35. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa
36. Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi
37. Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah
38. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
39. Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien
40. Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif
41. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat
42. Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi
43. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana
44. Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana
45. Meningkatkan kecepatan penanganan korban bencana
46. Meningkatkan pelayanan terhadap korban bencana
47. Meningkatkan pelayanan terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana
48. Meningkatkan kualitas air
49. Meningkatkan kualitas Udara
50. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan
51. meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan

*NAIK KUDA PERGI BERKELANA
KUDA BERLARI BAGAIKAN PANAH
MARI BIJAK MENYUSUN RENCANA
GUNA MENJADI PEDOMAN DAN ARAH*



TERIMA KASIH

Planning for a better Babel

**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**